

## Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Joni Firmansyah<sup>1</sup>, Leni Nurul Kariyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received 04 November 2021 Publish 12 November 2021</p>	<p>Pendidikan politik dan partisipasi politik merupakan dua hal penting bagi pemilih pemula di dalam keikutsertaannya kelak di dalam pemilihan umum. Tanpa adanya pendidikan politik, maka tidak akan ada partisipasi yang hadir atas kesadaran individu. Pemilih pemula sangat rentan untuk termobilisasi, apabila tidak dididik dengan baik. Di tengah pandemi Covid-19 yang mengkhawatirkan, justru diikuti oleh kekhawatiran baru bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, karena ruang gerak penyelenggara pemilu dan <i>stakeholder</i> lainnya sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui diskusi dan wawancara dengan informan tertentu secara mendalam (<i>indepth interview</i>). Data-data dalam penelitian ini juga berasal dari hasil diskusi secara daring bersama pemilih pemula dengan rentang usia 17-21 tahun yang belum pernah ikut dalam pemilihan umum. Temuan di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menguatnya pemilih sosiologis, berimbang pada kecenderungan pemilih pemula dalam berpartisipasi di dalam pemilu. Hal ini juga diperkuat dengan efek pandemi Covid 19 yang membatasi ruang gerak pemilih pemula, sehingga lingkungan menjadi faktor yang paling dominan dalam memberikan informasi dan pendidikan politik. Akibat dari ruang pengetahuan yang terbatas, media sosial menjadi sarana yang paling utama dalam memberikan edukasi politik tersebut. Oleh sebab itu, pemilih pemula harus tetap dibekali dengan pendidikan politik yang berkualitas dan selalu memberikan ruang partisipasi ide dan gagasan sebagai penentu keberlangsungan estafet pemilu yang adil dan berkualitas</p>
<p><b>Keywords:</b> Pemilu, Pemilih Pemula Sumbawa Covid-19</p>	
<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>	
	
<p><b>Corresponding Author:</b> Joni Firmansyah Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial E-mail: <a href="mailto:jonifirmansyah2050@gmail.com">jonifirmansyah2050@gmail.com</a></p>	

### 1. PENDAHULUAN

Adanya kesempatan yang sama, hak yang sama serta peluang yang sama bagi setiap warga negara di dalam politik merupakan bagian penting dari tumbuh- kembangnya demokrasi di Indonesia. Seluruh warga negara yang berlandung di bawah payung konstitusi, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kekuasaan, tanpa memandang latar belakang dan budaya, suku dan agama serta ras ataupun jenis kelamin. Sehingga tanpa terkecuali, setiap warga negara yang sah, dapat ikut serta di dalam pemilihan umum (pemilu) yang menjadi mekanisme pergantian kekuasaan. Hal ini merupakan contoh bagaimana suatu sistem demokrasi bekerja. Tetapi, yang patut diperhatikan lebih dalam bahwa demokrasi tidak hanya berbicara terkait cara, alat dan proses, tetapi demokrasi harus menunjukkan nilai-nilai atau norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Adnan Buyung Nasution, 2011).

Pemilihan umum merupakan ajang paling massif, bebas (*free*) dan adil untuk menentukan partai atau tokoh yang berhak mewakili rakyat. Dalam pemilu setiap orang dihargai sama, dengan demikian siapapun

yang terpilih paling banyak, dianggap memiliki sumber dukungan yang juga lebih banyak dibandingkan yang lainnya (Pramono Anung Wibowo, 2013). Melalui pemilu inilah, estafet kepemimpinan pemerintahan dapat dilanjutkan dan melalui pemilu jugalah, asas demokrasi dapat dipertahankan. Pemilu menjadi gerbang utama pelaksanaan sistem politik yang demokratis. Pelaksanaannya menjadi ruang bagi publik untuk mempunyai andil dalam pembentukan pemerintahan, dan memastikan kedaulatan sesungguhnya benar-benar berada di tangan rakyat (Alfito Deannova, 2008)

Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, telah resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional (Kompas, 2020). Sehingga dapat dipastikan, mundurnya jadwal pemilu tersebut memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengelaborasi lebih jauh tahapan, persiapan hingga kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik, maupun yang berasal dari kandidat perseorangan. Hal tersebut juga berlaku bagi pemilih pemula yang berada di Kabupaten Sumbawa, dalam menghadapi perhelatan politik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi posisi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa terkait partisipasinya di dalam pemilu. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen. Akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi muncul kelompok-kelompok yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Salah satu kelompok partisipan dalam pemilu adalah kelompok pemilih muda. Batasan pemuda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan batas umur anak muda sampai 30 tahun didasari oleh UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009 pasal 1 tentang: *Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun*. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada (Dwira Kharisma, 2015).

### **Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengulas terkait rendahnya pendidikan politik yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula menjelang pemilihan umum itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua KPU Arief Budiman, masifnya penyebaran Covid-19 memberikan keterbatasan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya keterbatasan dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik. Tidak hanya KPU, infrastruktur politik lainnya seperti partai politik, *civil society* dan lembaga-lembaga lainnya, juga memiliki keterbatasan untuk melakukan pendidikan politik tersebut. Sehingga dapat dipastikan jika pemilih-pemilih pemula dalam rentang usia 16-20 tahun yang baru pertama kali mengikuti pemilu, tidak memiliki pengetahuan dasar terkait bagaimana pemilu dapat dijalankan.

Pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan contohnya: partai politik, ormas dan tim sukses untuk meraup suara karna melihat dari karakteristik pemilih muda lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti, dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut serta dalam kampanye politik. Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Dwira Kharisma, 2015).

Penelitian ini memiliki beberapa poin yang akan diulas. *Pertama*, pemilih pemula dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19 yang membatasi ruang lingkup peserta pemilu dan penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi politik secara masif. Akibatnya, kebutuhan pemilih pemula terhadap informasi pemilu tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini menjadi perhatian yang serius, mengingat pemilih pemula merupakan ceruk suara yang menjanjikan. *Kedua*, menguatnya pemilih-pemilih sosiologis di Kabupaten Sumbawa pasca pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya dominasi faktor etnisitas dan kesukuan, merupakan entitas dari menguatnya politik identitas. Kecenderungan ini kemudian akan menjalar ke beberapa ceruk suara, di antaranya adalah pemilih pemula. Akan muncul dominasi suara yang termobilisasi lantaran pemilih

pemula kekurangan referensi di dalam pemilu. Akibatnya, pemilu akan menjadi ranah penguatan entitas kesukuan dan etnis yang semakin memperkuat politik identitas.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang tepat tentang bagaimana pemilih pemula memperoleh pengetahuan politiknya di tengah Pandemi Covid 19. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pemilih pemula melihat kontestasi politik di tengah keterbatasan mereka memperoleh pendidikan politik. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009).

Data-data di dalam penelitian ini bersifat narasi deskriptif yang dikumpulkan melalui diskusi dalam sebuah seminar online yang dilaksanakan bersama peserta yang berasal dari siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa yang tersebar di Kabupaten Sumbawa. Peserta tersebut mendapatkan materi terkait pendidikan politik dan partisipasi politik yang kemudian di diskusikan dalam forum tanya jawab. Hasil diskusi tersebut menjadi data-data primer yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sumbawa

Pendidikan politik memiliki peran yang begitu penting di dalam meningkatkan kualifikasi pemilih di dalam pemilu terhadap kandidat yang akan mereka pilih. Pendidikan politik ini kemudian menjadi sebuah tolok ukur yang dapat digunakan oleh pemilih pemula dalam menentukan keterwakilan politiknya. Dengan adanya pendidikan politik ini pula, pemilih pemula paling tidak memiliki wawasan untuk tidak terjebak di dalam mobilisasi kepentingan-kepentingan politik yang cenderung subjektif dan menguntungkan segelintir pihak.

“Selama ini kami hanya memperoleh informasi (terkait pemilu) dari internet maupun televisi. Selain itu, informasi lebih banyak kami peroleh dari obrolan orang tua maupun orang yang lebih dewasa daripada kami” (Wawancara bersama Ruswandi Hatami Ferdiansyah, siswa SMAN 1 Sumbawa Besar)

Apa yang dikemukakan oleh narasumber di atas merupakan suatu contoh bahwa pendidikan politik belum menyentuh para pemilih pemula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan politik merupakan sebuah dialog, artinya terdapat komunikasi dua arah dalam memberikan informasi di antara kedua belah pihak (*delivery information*). Namun, kebanyakan informasi yang diberikan hanya bersifat satu arah dan cenderung subjektif.

Di dalam penelitian ini, sebagian peserta mengaku bahwa mengikuti pemilu di Kabupaten Sumbawa yang akan terselenggara nanti, nyatanya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik oleh keluarga, rekan sepermainan, lingkungan pekerjaan hingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada umumnya. Melihat hal tersebut, tentunya ada keprihatinan bagi pemilih pemula ini atas minimnya tingkat pengetahuan yang mereka peroleh di dalam memahami partisipasi politik.

Kecenderungan dari dominasi faktor lingkungan terhadap pemilih pemula ini, diperkuat dari adanya dominasi lingkaran-lingkaran sosial yang terbentuk di tengah pemilih yang lebih mengarah kepada asas-asas hubungan kekeluargaan dan kebersamaan (Firmansyah dalam Nusra Media, 2020). Biasanya, kecenderungan ini mengindikasikan adanya dominasi tipologi pemilih sosiologis yang mengedepankan asumsi dasar bahwa manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, lingkungan kerja hingga lingkungan tempat tinggal. Di Kabupaten Sumbawa, persentase pemilih sosiologis mencapai 78,2% berdasarkan survei yang dilakukan oleh MY Institute periode Januari-Maret 2020. Maka, tidak heran bagi pemilih pemula yang belum memiliki pengetahuan terhadap pemilu dan politik, akan terikat pada lingkaran-lingkaran sosiologis tersebut.

“Pemilih sosiologis tentunya sangat berperan penting bagi kecenderungan para pemilih pemula. Hal ini disebabkan lingkungan pemilih pemula yang terbatas di tengah pandemi. Adanya larangan berkerumun yang mengharuskan menjaga jarak, membuat lingkaran para pemilih semakin terbatas. Hal inilah yang membentuk karakter dari pemilih tersebut” (Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute)

Pandemi tentunya berperan dalam mempengaruhi pandangan politik pemilih pemula, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yadi Satriadi tersebut. Pemilih secara tidak langsung “terisolasi” dari pendidikan

politik yang seharusnya ia peroleh secara langsung, baik dari kandidat maupun dari partai politik maupun peserta pemilu. Pandemi Covid 19 ini yang kemudian “memaksa” pemilih pemula secara tidak langsung membatasi dirinya dalam berinteraksi. Akibat dari interaksi yang terbatas ini, informasi maupun pengetahuan yang diperoleh juga terbatas. Sehingga, mobilisasi terhadap pemilih pemula didominasi oleh lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarga.

Pendidikan politik yang hadir di tengah pemilih pemula, seyogyanya menjadi tanggung jawab seluruh elemen warga negara, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Dalam Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, dijelaskan mengenai fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain: seminar dan lokakarya; sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; pagelaran seni dan budaya; jambore, perkemahan, napak tilas; dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Edwin Nurdiansyah, 2015).

Di tengah pandemi Covid-19 tersebut, tentunya ada keterbatasan bagi penyelenggara pemilu dalam membuka ruang publik guna memberikan edukasi politik. Hanya saja, selalu ada cara untuk tetap memberikan kebermanfaatannya bagi orang lain di tengah keterbatasan-keterbatasan tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, Idrus Affandi dan Karim Suryadi, pendidikan politik ini akan memberikan pilihan kepada masyarakat atas aspek-aspek yang dapat dipilih dalam menyalurkan keterwakilannya kelak. Hal ini adalah bentuk peningkatan demokrasi di tengah masyarakat, yaitu adanya ruang bagi publik untuk menelaah dan menentukan pilihan berdasarkan pemahamannya pada fenomena-fenomena politik. Pendidikan politik ini adalah sebuah gambaran nyata atas bentuk persiapan partisipasi warga negara dalam rangka keikutsertaannya di dalam menentukan masa depan negara.

#### **Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sumbawa**

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang turut andil di dalam setiap agenda-agenda politik. Di Kabupaten Sumbawa, pemilih pemula diberikan ruang untuk mencari dan menemukan ruang-ruang publik untuk mendiskusikan keikutsertaannya di dalam politik. Hanya saja, bagi pemilih pemula, bentuk partisipasi politik yang dilakukan masih bersifat mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan politik pemilih pemula yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dengan tingginya persentase pemilih sosiologis di Kabupaten Sumbawa, tidak mengherankan apabila bentuk partisipasi pemilih pemula cenderung termobilisasi.

“Hasil Survei MY Institute menjelaskan dengan tingginya angka persentase pemilih sosiologis, mobilisasi suara akan sangat mungkin terjadi, termasuk juga terhadap pemilih pemula tersebut. Oleh sebab itu, pemilih pemula harus dibekali dengan pemahaman politik yang memadai agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih pemula tersebut” (Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute)

Ruang yang terbatas dan menguatnya pemilih sosiologis, menjadi tantangan tersendiri bagi pemilih pemula. Partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, juga memiliki keterbatasan lantaran pandemi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Yadi Satriadi, jika ruang pembelajaran secara langsung bagi pemilih pemula terbatas, maka media sosial menjadi wadah dan sarana dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam diskusi yang digelar peneliti untuk menghimpun informasi terkait pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, sebagian besar menyebutkan bahwa sumber informasi yang berkaitan dengan pemilu, politik dan demokrasi diperoleh melalui media sosial. Padahal, tidak semua berita yang dapat diakses di media sosial dapat diuji kebenarannya.

“Media sosial adalah sarana yang paling *update* untuk memperoleh informasi. Bahkan, saya pernah membaca akan adanya regulasi atau peraturan yang memungkinkan anggota DPR dapat maju secara perseorangan” (Komentar Nindi Elma Sanjaya, peserta diskusi online, 14 Mei 2020)

Dari pernyataan salah satu peserta diskusi tersebut, dapat terlihat bahwa beragam informasi beredar di tengah pemilih pemula. Jika tidak dibekali dengan pendidikan politik yang baik, maka bias persepsi ini akan mengakar di tengah masyarakat. Partisipasi pemilih pemula memang tidak dapat dibatasi, namun dapat diatur dan diarahkan. Dengan dilibatkan di dalam proses kampanye, debat visi dan misi, hingga turut serta memberikan suara pada hari pemilihan umum, maka kualitas pemilih dan yang dipilih tidak perlu diragukan.

Adanya pemilih pemula yang merasa pemilu tidak bermanfaat, lebih dikarenakan adanya pendidikan politik yang keliru.

Sejalan dengan Huntington dan Nelson, partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa bersifat partisipasi mobilisasi (*Mobilized Participation*). Hal ini dikarenakan kesadaran pemilih pemula untuk berdiri secara otonom (*Autonomous Participation*), sangat sulit terwujud lantaran ruang lingkup pemilih pemula tersebut sangat terbatas. Sumber informasi yang diperoleh hanya bersifat satu arah dan nyaris tidak memiliki interaksi langsung kepada penyelenggara maupun peserta pemilu.

“Karena sumber informasi yang terbatas, maka minat kami untuk mengetahui pemilu secara lebih jauh juga tidak terlalu kuat. Pemilu akan tetap terselenggara sebagaimana mestinya” (Komentar Lilis Fitriah, Mahasiswa IISBUD SAREA)

Elaborasi terhadap bentuk partisipasi pemilih pemula di dalam pemilu, tidak boleh diabaikan meskipun adanya keterbatasan-keterbatasan di tengah pandemi Covid-19. Baik penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi maupun *civil society* dapat tetap memberikan ruang partisipasi bagi pemilih pemula tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan sangat beragam, misalnya melalui diskusi daring, seminar daring hingga pemanfaatan media-media sosial sebagai sarana pembelajaran. Pemilih pemula merupakan salah satu elemen yang dapat memberikan sumbangsih pemikirannya berdasarkan perkembangan teknologi dan zaman.

Manakala penyelenggara pemilu dan *stakeholder* lainnya tidak memberikan pendidikan politik dan tidak membuka ruang partisipasi politik, maka akan sangat sulit untuk menghadirkan masyarakat yang memiliki budaya politik yang tinggi. Salah satu efek yang timbul kedepannya adalah munculnya apatisisme politik di kalangan pemilih pemula. Pemilih-pemilih tersebut akan tidak menggunakan hak politiknya (golput) karena menganggap pemilu tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka. Pandemi Covid-19 memang membatasi ruang gerak bagi siapa saja, namun tidak membelenggu akal pikiran untuk tetap melakukan hal-hal positif, demi kelangsungan demokratisasi di Kabupaten Sumbawa.

#### 4. SIMPULAN

Pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, cenderung akan termobilisasi di dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Hal ini dikarenakan dominasi pemilih-pemilih sosiologis di Kabupaten Sumbawa yang cenderung tinggi, sehingga menciptakan lingkungan pemilih yang terikat. Hal ini tentunya tidak terlampaui baik bagi tumbuh kembangnya pemahaman pemilih pemula dalam menimbang dan memilih kandidat politik yang dapat mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi yang termobilisasi ini akan memberikan pemahaman yang keliru bagi peningkatan demokrasi, khususnya di dalam agenda politik lokal. Pemilih pemula akan merasa bahwa pemilu tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka sehingga banyak di antara mereka kedepannya yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu, penting kiranya untuk tetap memberikan pendidikan politik, walaupun adanya keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang juga berkembang di Kabupaten Sumbawa. Jika pemilih pemula tidak dapat didukasi secara langsung dan konvensional, masih ada wadah-wadah lain yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu dan *stakeholder* lainnya untuk tetap memberikan pemahaman politik bagi pemilih pemula sebagai bekal dalam menentukan pilihannya. Pemilih pemula ini merupakan estafet keberlangsungan atas pemilu yang demokratis dan berkualitas. Jika pendidikan politik dari mereka tidak diperhatikan, maka *output* dari pemilu itu sendiri sudah pasti tidak berkualitas.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi, Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik, dapat diakses di <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- Anung Wibowo, Pramono. 2013. Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi, Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen, Jakarta: Kompas Gramedia
- Budiardjo, Miriam. 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Buyung Nasution, Adnan. 2011. Demokrasi Konstitusional, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011
- Firmansyah, Joni, Perilaku memilih masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dapat diakses di <https://www.nusramedia.com/sosial-masyarakat/membaca-perilaku-pemilih-masyarakat-sumbawa-14953.html>
- Ginting, Alfito Deannova, 2008. Selebriti Mendadak Politisi, Studi Pragmatisme Kaum Selebriti Dari Panggung Hiburan Menuju Panggung Politik, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran

- Harian Online Kompas, KPU Resmi Terbitkan SK Penundaan Tahapan Pilkada, dapat diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/22/06253311/kpu-resmi-terbitkan-sk-penundaan-tahapan-pilkada-ini-rinciannya>.
- Kharisma, Dwira. Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Muda, *Jurnal Politico*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurdiansyah, Edwin. Implementasi Pendidikan Politik Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia, *E-Journal UNSRI Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 2 Mei 2015
- Wawancara bersama Ruswandi Hatami Ferdiansyah, siswa SMAN 1 Sumbawa, 18 September 2021
- Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute, 21 September 2021